



Buletin Parlementaria

Nomor 1187/III/II/2022 • Februari 2022



DPR Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan NTT



3 Puan Maharani:
Utamakan
Keselamatan WNI
di Ukraina



6 Sufmi Dasco:
Suara Azan Dianggap
Gangguan Itu
Berlebihan



9 772614 339005

DPR Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan NTT



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunjungan Reses Komisi VIII DPR RI meninjau sekolah pendidikan keagamaan di Manggarai Barat, NTT. Foto: Kiki/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ace menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dasar agama perlu dilakukan Kementerian Agama. Karena peran pendidikan agama merupakan tempat pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan karakter akan tumbuh baik jika dimulai dari tertanamnya jiwa keberagaman pada anak jika sarana prasarana sekolah sudah terpenuhi dengan baik.

“Kita perlu mendorong kualitas pendidikan keagamaan salah

satunya juga di NTT,” kata Ace sesuai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI meninjau Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (21/2). Kata Ace, NTT sudah mempunyai madrasah ibtidaiyah negeri dan madrasah tsanawiyah negeri di Manggarai Barat. Namun Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 belum mendapatkan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sehingga belum mempunyai ruang kelas yang memadai untuk proses belajar mengajar.

“Di NTT sudah ada madrasah ibtidaiyah negeri dan madrasah tsanawiyah negeri. Ada beberapa

madrasah tsanawiyah negeri sudah mendapatkan SBSN untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Ya sementara untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 belum mendapatkan bantuan, maka kami mendorong supaya kualitas pendidikan dasar keagamaan di Manggarai Barat perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama Pusat agar jumlah ketersediaan ruang belajar yang masih sangat terbatas dapat memberikan keleluasaan bagi siswa untuk belajar,” kata Ace.

Selain itu, kata Ace, Komisi VIII DPR juga mendukung permohonan status kenegerian sekolah tinggi agama Islam di Kupang. “Selain itu, kami juga mendukung permohonan penegerian sekolah tinggi agama Islam Kupang. Saya kira ini juga menjadi bagian yang harus menjadi perhatian karena di Provinsi NTT ini belum ada sekolah tinggi Agama Islam Negeri dan jumlah penduduknya juga banyak,” tutup politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan lapangan guna meninjau secara langsung penyelenggaraan pendidikan keagamaan khususnya di lingkungan Kementerian Agama, ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat yang pada tahun 2018 telah dinegerikan terhadap aspek pengelolaan belajar mengajar, sarana-prasarana, tenaga kependidikan serta seluruh siswa dan siswinya. ■ qq/sf



Puan Maharani: Utamakan Keselamatan WNI di Ukraina

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina, termasuk jika perlu dilakukan evakuasi WNI di Ukraina. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), tercatat ada 138 WNI yang berada di Ukraina.

Ketua DPR RI
Dr. (H.C) Puan Maharani.
Foto: Kresno/nvl

“Jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang terluka dalam konflik di Ukraina. Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas,” kata Puan, Jumat (25/2). Puan menilai, evakuasi terhadap WNI di Ukraina untuk kembali ke Indonesia saat ini sudah perlu dipertimbangkan serius.

“Sehingga pemerintah, KBRI dan semua *stakeholder* harus berkoordinasi dengan efektif jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI secepatnya dan seaman mungkin,” tambah mantan Menko PMK ini. Puan meminta pemerintah untuk menyiapkan segala kebutuhan WNI jika proses evakuasi dilakukan. Mulai dari *safe house*, kebutuhan sehari-hari, sampai transportasi untuk kembali ke Tanah Air.

Puan menegaskan evakuasi adalah salah satu bentuk perlindungan negara

yang harus dilakukan terhadap semua warga negara Indonesia yang sedang berada di wilayah konflik di luar Tanah Air. Terkait konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Puan mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif. Namun ia menyerukan agar perang dihentikan untuk menghindari kekerasan terhadap umat manusia.

“DPR meminta pemerintah Indonesia dengan bebas-aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia, lewat berbagai forum internasional, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Hentikan perang. Perang hanya menyisakan arang juga abu bagi yang melakukannya, dan manusia yang menjadi korbannya,” tegas Puan. ■ sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantini, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Tinjau IKN, Puan Maharani Ingin 'Nusantara' jadi Wajah Kemajuan Indonesia



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat meninjau pembangunan IKN. Foto: Bonis/rvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan 'Nusantara' itu. Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menggantikan Menkeu Sri Mulyani.

Lokasi titik nol menjadi yang pertama ditinjau oleh Puan di KIPP IKN. Di titik

nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR. Pembangunan di titik nol direncanakan dimulai pada semester 2 tahun ini. "Alhamdulillah hari ini saya sampai titik nol IKN, titik yang menentukan wilayah inti IKN," kata Puan.

Di sini, Puan mendapat penjelasan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya. "Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk

membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Titik nol sendiri hanya berjarak 5 menit dari lokasi Istana Negara jika menggunakan kendaraan, tepatnya sejauh 4 kilometer. Puan melewati jalan tanah dengan banyak truk pengangkut kayu untuk mendatangi Istana Negara yang letaknya berada di lokasi tertinggi KIPP IKN Nusantara. Kepada Puan, Wamenkeu mengatakan KIPP IKN akan dibangun dengan dana dari APBN yang jumlahnya akan ditentukan tahun ini. Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal-hal tersebut.

"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, *green*, *smart city*, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap. Kenapa *smart* dan *green*? Karena itu kebutuhan kita ke depan. Kota modern, hijau dan memperhatikan lingkungan," tandas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan dirinya sudah meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Ia secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN. Permintaan Puan langsung dijawab Jenderal Andika yang menyatakan TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.

"Sinergi, koordinasi dengan seluruh unsur bangsa. Dari elemen eksekutif, legislatif, dan jangan diputuskan oleh salah satu pihak saja. Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," tambah mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut. ■sf



Rachmat Gobel Dorong HB Jassin Jadi Pahlawan Nasional

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mendorong kritikus sastra, dokumenter, dan profesor Indonesia H.B. Jassin untuk mendapat gelar

kepahlawanan. Bagi Gobel, H.B. Jassin merupakan pelaku sejarah khususnya di bidang sastra yang patut diberikan gelar kepahlawanan atas perjuangannya untuk membangun nilai-nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia.

“Saya sendiri sebagai generasi penerus, tentu ingin sekali memberikan dorongan gelar kepahlawanan ini kepada almarhum, bukan hanya sebagai pahlawan, tapi jauh daripada itu adalah bagaimana nanti mengajak masyarakat tentang bagaimana sastra Indonesia kita ini yang sangat luar biasa sebetulnya,” ungkap Gobel usai menghadiri Seminar Nasional

‘Aspirasi Pahlawan Nasional H.B. Jassin 1917-2000’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, generasi muda kini memiliki kecenderungan mulai melupakan apa yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri khususnya di bidang budaya. “Kita lihat saja paling gampang misalnya Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia saja sekarang banyak yang sudah disingkat-singkat banyak orang mencampurkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dari situ kita bisa lihat. Bagaimana kita berbicara tentang NKRI secara utuh kalau dari nilai-nilai budaya kita juga sudah mulai agak meluntur,” imbuhnya.

Untuk itu, dengan diberikannya gelar kepahlawanan kepada H.B. Jassin, Gobel berharap dapat membuka mata para generasi muda dalam melestarikan budaya Indonesia dengan melihat sosok seorang tokoh yang luar biasa. “Makanya saya katakan di sini pahlawan peradaban Indonesia,” harap legislator dapil Gorontalo itu.

Setelah gelar kepahlawanan resmi diberikan kepada H.B. Jassin, Gobel berencana akan membuat penghargaan bagi kritikus dan sastrawan sebagai pemicu semangat dalam melestarikan nilai-nilai yang telah dibangun H.B. Jassin. “Kami kan juga tidak stop sampai di gelar pahlawan yang diberikan tapi bersama-sama dengan kawan-kawan tadi seperti dikatakan, saya akan mencoba membuat ada ‘Jassin Award’ untuk para kritikus-kritikus untuk membangun khazanah maupun semangat para sastrawan kita semua sehingga kita harus melestarikan nilai-nilai yang sudah dibangun yang sudah dibuat almarhum sendiri,” tutup Gobel. ■ **bia/sf**

Wakil Ketua DPR RI
Korinbang Rachmat
Gobel . Foto: Azka/mvl



Sufmi Dasco: Suara Azan Dianggap Gangguan Itu Berlebihan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan yang menganggap suara azan sebagai suatu gangguan adalah suatu hal yang berlebihan. Hal ini disampaikan Dasco dalam menanggapi pernyataan dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu yang menganalogikan ramainya suara azan dengan teriakan salah seekor binatang yang sangat riuh.

“Jika suara azan itu dianggap sebagai gangguan, saya pikir itu berlebihan,” jelas Dasco sebagaimana dikutip dari sosial media ‘Instagram Story’ pribadinya, Kamis (24/2). Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan suara azan di Indonesia sangat bermakna dan menjadi semacam budaya Indonesia.

Azan itu dikumandangkan dari tiap-tiap masjid dan musala sebanyak lima kali sehari dengan durasi 1 hingga 1,3

menit. “Sehingga, azan tersebut tidak bisa disamakan dengan suara apa saja, apalagi dianggap sebagai suara yang mengganggu,” jelas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.

Saking sakralnya, Dasco menilai suara azan tidak sekadar sarana untuk mengingatkan dan memanggil umat Islam untuk salat saja. Tetapi, juga dapat dikategorikan sebagai kearifan dan cagar budaya dalam hidup bertoleransi antarumat beragama di Indonesia.

“Untuk itu, di tengah keberagaman yang kita miliki, saya mengajak kepada semua pihak untuk memaknai toleransi dengan baik. Mari kita pertebal semangat persatuan, saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa dan juga antarumat beragama,” tutupnya.

■ rdn/sf

”

SUARA AZAN TIDAK SEKADAR SARANA UNTUK MENGINGATKAN DAN MEMANGGIL UMAT ISLAM UNTUK SALAT SAJA. TETAPI, JUGA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI KEARIFAN DAN CAGAR BUDAYA DALAM HIDUP BERTOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Gerald/nvl



Gus Muhaimin Sambangi Ponpes Miftahul Khairat yang Terbakar

Insya Allah *syahid*, amin,” harap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).

Suasana mengharukan terlihat jelas dalam kesempatan tersebut. Air mata Gus Muhaimin nampak berlinang saat mendengar informasi awal mula musibah itu terjadi dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khairat, KH. Agus Muhtadi. Gus Muhaimin juga sempat menengok asrama santri yang terbakar sembari mendengarkan kesaksian Kiai Agus saat musibah

kebakaran terjadi.

“Tiada kata-kata yang bisa kami ucapkan kecuali terima kasih atas kehadirannya Cak Imin bersama rombongan. *Jazakumullah ahsanal jaza*. Semoga doa kita bersama menjadi diterima oleh Allah,” kata Kiai Agus.

Kebakaran di Pondok Pesantren Miftahul Khoirot itu terjadi pada Senin (21/2) sekitar pukul 14.33 WIB. Saat itu kebanyakan santri yang masih duduk di sekolah dasar ini sedang tidur

di kamar. Namun tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran dari dalam pondok pesantren. Sebagian penghuni pesantren berlarian keluar.

Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke RSUD Karawang. Dari delapan korban, satu orang korban belum diketahui identitasnya. Adapun identitas korban yaitu: 1. Alif Satria (7) asal Cikampek, 2. Muhamad Fatir (7) asal Subang, 3. Rian Aditio (7) asal Subang, 4. M Akmal Maulana (12), 5. Mujaki Riadi (13) asal Cilamaya, 6. Moreno (10) asal Cilamaya, 7. Azka Pairul Gupron (11) asal Subang, dan 8. Masih proses identifikasi. ■sf



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat meninjau Pondok Pesantren Miftahul Khairat. Foto: Ist/nvl

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyambangi Pondok Pesantren Miftahul Khairat, Desa Manggunjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mengalami musibah kebakaran hingga merenggut nyawa delapan santri dan dua santri lainnya terluka.

“Innalillahi wainna ilaihi rajun.

Saya atas nama keluarga besar PKB, atas nama Pimpinan DPR RI hadir di sini mengucapkan dukacita mendalam untuk para santri yang

menjadi korban kebakaran. Semoga Allah mengabulkan amal ibadah seluruh korban,” kata Gus Muhaimin di Karawang, Selasa (22/2).

Gus Muhaimin mendoakan santri yang menjadi korban kebakaran tersebut meninggal dalam keadaan *syahid*. Terlebih mereka sedang mencari ilmu di pondok pesantren yang juga dikenal sebagai lembaga Tahfidzul Qu’ran. “Kita doakan adik-adik santri yang mendahului kita amal ibadahnya diterima di sisi Allah, menjadi mulia. Insya Allah mereka *syahid*. Adik-adik santri wafat saat mencari ilmu, juga menghafal Alquran,

Komisi VII: Syarat Impor *Raw Sugar* Harus Miliki Kebun Tebu



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI ke PT KTM. Foto: Arief/rvi

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, syarat untuk pabrik gula yang berhak mengimpor *raw sugar* adalah pabrik gula yang memiliki kebun tebu untuk keberlangsungan industrinya. PT Kebun Tebu Mas (KTM) yang merupakan pabrik gula di Lamongan, Jawa Timur, sudah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan bahan baku berupa *raw sugar* dari jumlah impor yang per tahunnya kurang lebih 3 juta ton.

Demikian dikatakan Sugeng saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Kadis Perindustrian Jatim, Bupati Lamongan serta direksi dan manajemen PT Kebun Tebu Mas (KTM), di Lamongan, Jatim, Sabtu (19/2).

Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meninjau kegiatan operasional pabrik gula di Jatim.

“Kita impor *raw sugar* yang dalam setahun kurang lebih hampir tiga juta ton, dari *raw sugar* itu bisa untuk kepentingan industri, ada sebuah tata niaga yang akan kita cek betul siapa yang berhak mengimpor dan tidak mengimpor karena ada prasyarat yang berhak mengimpor adalah pabrik gula yang juga memiliki kebun. Itulah aturannya,” tegas Anggota Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Sugeng menerangkan, pabrik gula KTM memenuhi segala syarat untuk mendapatkan bahan baku dalam negeri yang ditempuh dengan upaya dari petani. Kebun tebu yang disyaratkan kurang lebih mencakup 5000 hektare.

Inilah yang terus ditelusuri Komisi VII DPR RI agar kemandirian pemenuhan kebutuhan akan gula oleh industri dalam negeri akan terus ditingkatkan dan impor akan terus ditekan.

“Kita tahu banyak pabrik-pabrik gula yang tidak memiliki kebun, tidak ada upaya membangun kemandirian gula. Bahan baku bisa diperoleh dari dalam negeri dari petani tebu dengan memiliki lahan yang disyaratkan. Tetapi jika tidak cukup berhak mengimpor *raw sugar*, ini yang tidak *fair* karena ada syarat untuk mengimpor *raw sugar* itu harus berupa pabrik yang juga memiliki kebun, agar ada semacam subsidi silang, supaya pabrik dengan efisiensi yang tinggi maka mempunyai *profit* bisa membeli tebu rakyat yang dengan harga yang baik, konsekuensinya seperti itu,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII itu. ■ afr/sf



Komisi VII Dorong Industri Pemberdayaan UMKM Indonesia

Mengetahui potensi besar peran industri tepung terigu di Indonesia, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman berharap industri tepung terigu berkontribusi terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar UMKM, yang bergerak di sektor makanan, tengah menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19.

“Keberadaan industri tepung ini telah memberikan pemasukan negara yang besar. Kami mendorong industri tepung juga ikut memberdayakan UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, *marketing*, dan juga mungkin bantuan modal,” tutur Maman usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PT Indofood-Divisi Bogasari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (21/2).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menilai peran industri dalam memberdayakan

UMKM akan turut membuka lapangan kerja di tingkat daerah. Bergerak di bidang yang sama, industri dapat bahu-membahu mengedukasi UMKM untuk fokus mengolah potensi daerah, terutama di bidang kuliner.

Di sisi lain, ia pun mendorong Kementerian Perindustrian untuk menyederhanakan tahapan sertifikasi UMKM sekaligus distribusi produk. Dengan membangun koordinasi lintas kementerian, seperti BPOM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian bisa membangun iklim bisnis yang membuka peluang UMKM untuk memperoleh pangsa besar, baik nasional maupun internasional.



KAMI MENDORONG INDUSTRI TEPUNG JUGA IKUT MEMBERDAYAKAN UMKM, MULAI DARI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK, *MARKETING*, DAN JUGA MUNGKIN BANTUAN MODAL

“UMKM di negara kita (jumlahnya) besar sekali. Ternyata di tengah pandemi, *buffer zone* yang mengamankan masyarakat agar tidak terlalu jatuh dan terjerembab adalah UMKM. Kita mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan. Namun, negara dan industri harus terus memacu dan ditingkatkan kembali (pemberdayaan UMKM),” tandas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. ■

ts/sf

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman. Foto: Saum/mvl



Komisi VII Harap Pertamina RU III Plaju Optimalkan Produksi dengan Memperhatikan Energi Terbarukan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, di era sekarang menuju target netral karbon, banyak perusahaan global berlomba-lomba untuk mengembangkan portofolionya ke arah energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam hal ini, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju dipercaya pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar nabati berbasis *Crude Palm Oil* (CPO) yang merupakan bahan bakar lebih ramah lingkungan melalui *Project Green Refinery*.

“Pengembangan ini bertujuan untuk mendukung bauran energi nasional dan target kemandirian energi nasional dengan memperluas penggunaan energi terbarukan yang berkelanjutan,” jelas Eddy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja mitra Komisi VII, terkait kinerja Pertamina RU III Plaju dan perkembangan proyek *Green Refinery* sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, di Kantor Pertamina RU III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (19/2).

Politisi PAN ini berharap Pertamina RU III Plaju bisa mengoptimalkan produksi dengan mengikuti perkembangan terkini serta memperhatikan penggunaan energi terbarukan. “Walaupun sudah dibangun sejak tahun 1904, diharapkan Pertamina RU III Plaju terus menunjukkan eksistensinya melalui bermacam inovasi dan pengembangan teknologi



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunker Reses Komisi VII DPR RI. Foto: Eko/nvl

”
PENGEMBANGAN INI BERTUJUAN UNTUK Mendukung Bauran Energi Nasional dan Target Kemandirian Energi Nasional dengan memperluas Penggunaan Energi Terbarukan yang Berkelanjutan

demi mencapai optimalisasi produksi dan keunggulan operasional dengan mengikuti perkembangan terkini,” papar Eddy lebih lanjut.

PT Pertamina RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai salah satu tiang ketahanan energi nasional. Komisi VII berharap dengan kunjungan ini bisa menciptakan peningkatan sinergi antara Komisi VII dengan para mitra kerja dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional. Kunjungan pengawasan ini sesuai amanat UUD 1945.

Dalam kesempatan ini, Komisi VII juga menggali informasi terkait dengan profil dan kinerja Pertamina RU III Plaju, serta perkembangan proyek *Green Refinery* sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Permasalahan yang dihadapi dan dukungan yang diharapkan oleh para mitra kerja, mengingat salah satu fungsi *additional* dari Komisi VII adalah fungsi *problem solving*. ■ eko/sf

Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam menyoroti mahalny biaya haji yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini yang berpotensi akan memberatkan para calon jemaah haji. Dibandingkan dengan biaya haji pada tahun-tahun sebelumnya, Wastam menilai biaya haji tahun ini yang direncanakan sebesar Rp45 juta, tergolong mahal.

Terkait hal itu, Wastam menegaskan siap memperjuangkan agar biaya haji minimal sama seperti tahun lalu. Demikian disampaikan Wastam usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang meninjau Asrama Haji Ternate, Provinsi Maluku Utara, Senin (21/2).

Komisi VIII Soroti Mahalnya Biaya Haji Tahun 2022

”

KOMISI VIII MENILAI BIAYA HAJI TAHUN INI TERLALU MAHAL. SEBAGAI TINDAK LANJUT, KOMISI VIII SIAP MEMPERJUANGKAN AGAR BIAYA HAJI MINIMAL SAMA SEPERTI BIAYA HAJI TAHUN LALU.

“Komisi VIII menilai biaya haji tahun ini terlalu mahal. Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII siap memperjuangkan agar biaya haji minimal sama seperti biaya haji tahun lalu. Di antaranya melalui

upaya realokasi pos anggaran untuk mensubsidi biaya haji, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya calon jemaah,” ujar Wastam.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan Komisi VIII DPR RI juga mendalami berbagai opsi untuk meningkatkan kinerja asrama haji. Termasuk dalam hal pengelolaan aset asrama dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga asrama haji ke depannya diharapkan lebih mandiri.

Menutup pernyataannya, Wastam mendorong Kementerian Agama semakin memaksimalkan pelayanan terbaik Asrama Haji terutama terhadap para calon jemaah haji. “Sehingga melalui Asrama Haji, para calon haji bisa benar-benar mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya dan mendapatkan kenyamanan,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Sebagaimana diketahui, Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI meninjau Asrama Haji Ternate dan kemudian dilanjutkan peninjauan Balai Rehabilitasi Sosial ‘Wasana Bahagia’ di Maluku Utara dalam rangka pengawasan, sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan bidang kerja Komisi VIII DPR RI antara lain agama dan sosial.

Komisi VIII DPR RI disambut Gubernur Maluku Utara, Kakanwil Kemenag, Rektor IAIN Ternate, Kadinsos, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala BPBD Maluku Utara, Ketua BAZNAS Maluku Utara, Ketua BWI Maluku Utara, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Maluku Utara. ■ ron/sf

Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam.
Foto : Aaron/nvl





Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunjuran Reses Komisi IX DPR RI ke Papua Barat. Foto: Chasbi/nvl

Perlu Peran Tokoh Agama dan Adat untuk Tingkatkan Vaksinasi di Papua Barat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menilai bahwa terkait dengan penanganan pandemi di Provinsi Papua Barat sudah relatif baik, kecuali capaian yang paling menjadi masalah yaitu tentang jumlah angka vaksinasi. Menurutnya peran pemerintah sudah baik, tetapi untuk meningkatkan angka vaksinasi juga diperlukan peran dari tokoh agama dan tokoh adat setempat.

“Kami lihat yang paling menjadi masalah yaitu tentang angka vaksinasi. Angka vaksinasi tahap I baru 50-an persen kemudian vaksinasi tahap II sekitar 30-an persen. Jadi memang satu catatan terpenting dari pertemuan ini adalah kita butuh strategi ataupun pola untuk mempercepat vaksinasi di Papua Barat ini,” kata Melki, sapaan akrabnya, saat memimpin Tim Kunjuran Kerja Reses Komisi IX DPR RI bertemu jajaran Pemerintah Provinsi

Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Senin (21/2).

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, bahwa instansi-instansi yang ada di Papua Barat sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan vaksinasi tahap I dan tahap II misalnya dengan memberikan vaksin gratis, pembagian sembako dan *doorprize* sepeda motor bagi masyarakat yang ingin divaksin.

“Sudah banyak anggaran untuk membuat semacam insentif kepada orang yang akan divaksin. Tetapi memang nampaknya butuh kolaborasi sangat kuat terutama dari aspek tokoh agama dan tokoh adat sehingga jika pemerintah dibantu dengan tokoh agama dan tokoh adat mudah-mudahan vaksinasi di Papua Barat ini bisa lebih cepat lagi,” harap legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Disduknakertrans, Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Papua Barat, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa). ■ cas/sf

Komisi IX Prihatin Atas Tingginya Angka *Stunting* di Gorontalo

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti masih tingginya angka *stunting* di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah yaitu 14 persen. Menurutnya, penyelesaian persoalan *stunting* ini tidak hanya hal yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan *stunting*.

“Soal budaya, Gorontalo penghasil ikan yang luar biasa. Tuna itu sumber gizi yang luar biasa, namun mungkin ada budaya-budaya itu menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil itu tidak mendapatkan akses (konsumsi

ikan) itu. Bisa jadi mereka memiliki budaya yang menjadikan perempuan itu kalau makan mungkin harus setelah suaminya, atau apa ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu,” katanya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim, beserta mitra kerja terkait, di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Selasa (22/2).

Berdasarkan penjelasan Kepala Wilayah BKKBN Gorontalo, masih tingginya angka *stunting* karena ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik biasa Nihayatul disapa, beranggapan jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, seharusnya persoalan gizi itu sesuatu yang sederhana dan mudah didapat. Dengan kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan, hal ini merupakan potensi terbesar Gorontalo. Namun, memang diakui Ninik, dari jumlah penduduk sebesar 1,3 juta, 900 penduduk itu adalah penduduk miskin.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Nadya/nvl

“Itu yang perlu kita lihat, apakah itu mempengaruhi soal *stunting*, itu yang (angka) *stunting* masih memang PR sekali. Saya pernah melakukan sosialisasi soal *stunting* ini dari 5 kabupaten 1 kota sudah pernah saya datangi semua dengan BKKBN, kita melihat memang pemahaman masyarakat soal *stunting* itu belum memadai seperti apa, apakah itu juga menjadi persoalan kita lihat nanti,” papar politisi PKB tersebut.

Oleh karenanya, Ninik meminta kepada Kepala Kanwil Wilayah BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menangani persoalan *stunting* tersebut, dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa *stunting* masih tinggi di Gorontalo. Ninik mengakui, memang membutuhkan kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan *stunting* di Gorontalo.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin dengan tingginya angka *stunting* yang masih tinggi di Gorontalo di atas rata-rata Nasional. Mengingat, kondisi geografis Gorontalo yang kaya akan hasil laut, seharusnya kebutuhan gizi dan proteinnya dapat terpenuhi.

“Kami sangat memprihatinkan karena kondisi geografis alami di Gorontalo inikan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi. Kemudian dari segi makanan jagung di sini nomor satu, dari segi kesediaan alam tidak jadi masalah, mungkin yang menjadi masalah pola hidup atau pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. Karena di sini juga anemia masih sangat tinggi,” ujar politisi Partai Golkar itu. ■ ndy/sf



Dewi Asmara Dorong Pemprov Maluku Pastikan Seluruh Perangkat Sistem Kesehatan Siap Hadapi Lonjakan Ketiga Covid-19



Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemprov Maluku. Foto: Ria/nvl

Saat ini Indonesia tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang didominasi varian Omicron dimana penularannya sangat cepat. Dalam seminggu terakhir ada kenaikan *positivity rate* yang sangat tajam yang per tanggal 19 Februari mencapai 50,32 persen berdasarkan *test swab* PCR dan TCM.

“Dengan *positivity rate* yang 10 kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), kami mendorong Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh pihak yang hadir hari ini untuk bahu-membahu memastikan seluruh perangkat sistem kesehatan di Provinsi Maluku telah siap,” imbau Anggota Komisi IX DPR

RI Dewi Asmara saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (21/2).

Disampaikan Dewi, tujuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Maluku untuk mendapatkan penjelasan terkait kesiapan sistem kesehatan di Maluku, termasuk SDM kesehatan, obat dan alkes serta tempat tidur dan oksigen. “Secara umum cukup baik dalam menghadapi pandemi gelombang ketiga,” nilai Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Menurut Dewi ada tiga hal penting selain kesiapan sistem kesehatan yang harus diperhatikan dalam menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Pertama,

ia mendorong Satgas Covid-19 Maluku dan Dinas Kesehatan untuk terus memantau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupancy Rate* (BOR) untuk pasien Covid-19.

“Ini yang harus menjadi salah satu indikator utama dalam pengendalian varian Omicron. BOR rumah sakit secara nasional saat ini yang di angka sekitar 37 persen. Kami nilai masih aman dan kita berharap BOR akan dapat menurun beberapa minggu ke depan,” katanya.

“Kedua, kami tidak henti-hentinya mendorong adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi, baik vaksinasi primer maupun vaksinasi *booster*. Kami memahami tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku dengan kondisi geografis berpulau-pulau yang tentunya tidak mudah, sehingga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya upaya Pemerintah Provinsi Maluku bersama TNI-Polri yang terus berusaha meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19,” jelas Dewi.

“Kami mendukung upaya-upaya percepatan yang dilakukan seperti vaksinasi terapan dan vaksinasi *door to door* dan meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan perhatian adanya kebutuhan khusus untuk mendukung pelaksanaan upaya-upaya ini. Ketiga, tentunya kami mendorong agar sosialisasi pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat terus diintensifkan, khususnya untuk melindungi kelompok paling rentan seperti lansia,” tutup legislator dari Jawa Barat IV tersebut. ■ rnm/sf



Komisi X Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur PON XXI Aceh-Sumut

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan, Komisi X DPR

RI berkomitmen mendukung dan mengawal pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan PON XXI yang akan diselenggarakan di Aceh-Sumut pada tahun 2024. Ia menyampaikan, PON XXI ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di dua provinsi.

“Kita akan terus mengawalnya dan kami sangat yakin PON XXI Aceh-Sumut akan berjalan sukses,” ujar Fikri ketika ditemui usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta jajaran di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (23/2). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali.

Politisi PKS ini mengatakan, kehadiran Menpora bersama dengan Komisi X ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun prestasi olahraga nasional terutama di Aceh yang akan menjadi tuan rumah PON XXI tahun 2024 mendatang.

Di sisi lain, Fikri juga menyampaikan, Komisi X bersama Menpora baru saja menyelesaikan UU Keolahragaan. Lahirnya UU tersebut dipandang sebagai bentuk kesungguhan proyeksi keberhasilan prestasi olahraga Indonesia di masa depan. “Berkat kerja sama dan dorongan yang kuat (dari Menpora), Komisi X baru saja pecah telur melahirkan UU Keolahragaan,” tutur Fikri.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Zainuddin Amali mengaku akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung PON 2024. “Kita akan mendorong kementerian terkait khususnya yang menangani infrastruktur



KEHADIRAN MENPORA BERSAMA DENGAN KOMISI X INI SEBAGAI BENTUK KESERiusAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL TERUTAMA DI ACEH

Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Abdul Fikri Faqih.
Foto: Erman/nvl



yakni Kementerian PUPR agar sarana dan prasarana dapat segera dibangun,” Zainuddin.

Menpora juga meminta Pemerintah Aceh agar merencanakan pembangunan fasilitas olahraga dapat terintegrasi sehingga bisa digunakan secara berkelanjutan. “Artinya, perencanaannya harus direncanakan secara matang sehingga pembangunan sarana olahraga ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi lainnya,” pungkas Zainuddin. ■ es

Komisi XI Nilai Tren Pemulihan Ekonomi Kaltim Terus Berlanjut di Tahun 2022

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi berbagai kerja sama dan kolaborasi mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur yang telah berupaya maksimal membangun momentum pemulihan ekonomi nasional dan regional tahun 2021 dan 2022. Menurutnya, momentum pemulihan ekonomi domestik terus menguat sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan PDRB tahun 2021 Kaltim Timur mencapai 2,48 persen (yoy). Dari sisi kontribusi komponen pengeluaran, net-ekspor memiliki kontribusi terbesar dengan 49,38 persen dan 30,24 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah berkontribusi sebesar 3,94 persen.

Demikian diungkapkan Dito saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Balikpapan, Kaltim, Senin (21/2). Agenda kunjungan kerja tersebut membahas seputar perekonomian terkini dan akselerasi pemulihan ekonomi di Kaltim tahun 2022. Rangkaian agenda dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Regional Bank Himbara serta perwakilan Jamkrindo.

Selain itu, Dito menyatakan bahwa akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan penerapan PPKM menjadi kunci keberhasilan menekan penyebaran Covid-19. Inflasi Kaltim pada Desember 2021 tercatat 2,15 persen (yoy), relatif terus mengalami peningkatan selama tahun 2021. Hal ini menandakan daya beli/konsumsi masyarakat tetap terjaga



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto bertukar cenderamata dengan mitra kerja. Foto: Taufan/nvl

di tengah pandemi Covid-19, selain itu, kebijakan pemerintah melalui jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai maupun non tunai berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Dito menyebut bahwa indikator kesejahteraan Kaltim tahun 2021 menunjukkan tren positif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 tercatat pada angka 76,88. Kemudian, tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 6,27 persen, mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kaltim tahun 2021 tercatat pada periode Agustus 2021 mengalami penurunan menjadi 6,83 persen. Ke depan, berbagai sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui reformasi struktural yang terus dilakukan harus dapat memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, kinerja penyaluran kredit Kaltim tahun 2021 mulai tumbuh positif sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian Kaltim. Pada tahun 2022, diperkirakan kinerja penyaluran kredit Kaltim tetap mampu melanjutkan tren positif seiring dengan prakiraan terus membaiknya kinerja perekonomian di seluruh sektor di Kalimantan Timur dengan asumsi bahwa kasus Covid-19 pasca varian Omicron dapat terkendali serta berkurangnya pembatasan kegiatan di berbagai sektor ekonomi.

Di tahun 2022, dengan melihat berbagai indikator tersebut, Dito optimis perekonomian Kaltim tahun 2022 tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2021 yang didorong oleh semakin pulihnya aktivitas masyarakat di Kaltim dan ditopang vaksinasi yang kian masif serta peningkatan kinerja industri pengolahan dan konstruksi. ■ tn/sf

Komisi XI Soroti Tingkat Kemiskinan di NTT

Komisi XI DPR RI menyoroti tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mengingat angka kemiskinan di NTT pada September Tahun 2015 sebesar 22,58 persen, dan pada Tahun 2021 hanya turun menjadi 20,44 persen. Sementara persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sekaligus menjadi tantangan bagi Komisi XI DPR RI.

“Kita ingin memberikan perhatian khusus kepada NTT, karena tingkat kemiskinan yang masih akut 20 persen lebih ini menjadi tantangan kita (Komisi XI DPR RI), karena secara nasional kita sudah mengalami penurunan di bawah

satu *digit*, tapi NTT masih di atas dua *digit*,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Labuan Bajo, NTT, Senin (21/2).

Politisi PKB itu menilai, dengan bauran kebijakan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat memberikan rasa optimis akan ada peningkatan dari segi kualitas hidup, peningkatan dunia kerja dan juga memacu pertumbuhan ekonomi di NTT bisa lebih baik.

“Karena itu juga kami di (NTT) sini memantau seluruh program-program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah NTT. Bagaimana

perkembangan bank-bank di NTT dalam penyaluran kredit, bagaimana sinergi Bank Indonesia, bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya,” jelas Fathan.

Namun demikian, meskipun kemiskinan di NTT mengalami penurunan, ketimpangannya belum banyak berubah. Fathan pun mengatakan penyaluran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di NTT melalui perlindungan sosial, stimulus pajak, hingga pendapatan dari sektor pajak hingga saat ini sudah mengalami peningkatan.

“Oleh karena itu kami minta Pemerintah Pusat untuk terus memberikan atensi, perhatian, dan juga skema khusus bagi NTT, karena ini kerja keras kita bersama sehingga NTT bisa kita tuntaskan dari kemiskinan,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II itu.

Pertemuan tersebut pun dihadiri turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI lainnya yakni I Gusti Agung Rai Wirajaya (F-PDIP), Ela Siti Nuryamah (F-PKB), Vera Febyanthry (F-Demokrat), Anis Byarwati (F-PKS), Didi Irawadi Syamsuddin (F-Demokrat) dan Andi Achmad Dara (F-Golkar). ■ hnm/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI ke Labuan Bajo, NTT. Foto: Hanum/nvl

Komisi XI Minta Kejelasan Langkah OJK Lindungi Nasabah Asuransi



Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly (kanan) saat memimpin kunker reses Komisi XI DPR RI ke Lampung. Foto: Hira/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta kejelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi dan melindungi nasabah asuransi. Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menerima aduan dari nasabah asuransi Bumiputera yang klaimnya sudah masuk jatuh tempo, namun belum bisa dicairkan.

“Nah itu perlu segera ada kejelasan. Jadi paling tidak, masyarakat itu tahu apa yang sudah dilakukan oleh OJK, kira-kira mereka (OJK) masih bisa diharapkan tidak, selain dari yang punya (premi) mereka itu bisa direalisasikan,” ujar Junaidi di sela-sela memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Lampung, Senin (21/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menilai kinerja OJK berdasarkan paparan yang disampaikan, sudah cukup baik implementasinya di Lampung. Menurut Junaidi, kinerja OJK sudah terlihat, terutama dengan visinya OJK untuk mengatur mengawasi industri jasa keuangan dan melindungi nasabah perbankan, khususnya di Lampung.

“Secara umum kita *pengen* (OJK) kinerjanya jadi lebih baik lagi ya. Tentu saja kita ingin seperti itu. Tetapi nanti tolok ukurnya adalah sampai sejauh mana angka-angka itu ditingkatkan menjadi lebih signifikan. Bukan hanya kenaikan, tapi tidak begitu memberikan dampak yang positif buat masyarakat,” lanjut politisi dapil Lampung.

Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan Komisi XI DPR

RI membatasi mitra kerja yang hadir dalam agenda kunjungan kerja reses tersebut karena untuk pembahasan yang lebih fokus mengenai perekonomian Lampung, khususnya OJK. Mitra kerja Komisi XI DPR RI yang hadir dalam agenda tersebut yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, sektor perbankan seperti BNI, Mandiri, BRI dan BTN, serta Jamkrindo dan Askrindo.

“Jadi banyak ide-ide yang mereka gelontorkan. Program-program yang mereka lakukan sampai sejauh mana itu diketahui oleh masyarakat, khususnya pemerintah daerah untuk bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari program-program itu,” tutup Junaidi. ■ hal/sf



Fadli Zon Suarakan Solidaritas Global Demi Tekan Ketimpangan Struktural Ekonomi Dunia di Forum PBB



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama Pimpinan BKSAP menghadiri Sidang IPU Parliamentary Hearing di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. Foto: Ist/mtv

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyuarkan solidaritas global demi menekan ketimpangan struktural ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang kebal oleh Covid-19. Sehingga, solidaritas global dianggap mampu menguatkan setiap negara di dunia untuk bekerja sama agar segera pulih di segala aspek pasca-pandemi.

“Jika ketimpangan ini tidak ditangani serius, maka akan makin tajam ketimpangan negara maju dan negara berkembang, orang kaya dan orang miskin. Tentu akan semakin menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tutur Fadli Zon dalam Sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Hearing at the United Nations* di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Jumat (18/2).

Dihadiri lebih dari 200 anggota parlemen dari 70 negara dunia, Fadli menekankan kerja sama dan kolaborasi sebagai prinsip solidaritas global. Pasalnya, ia menilai dampak Covid-19 dirasakan tidak hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Lebih lanjut ia menjelaskan, Covid-19 telah mempersulit upaya pencapaian 17 tujuan dalam SDGs, karena pandemi mempertegas ketimpangan ekonomi di seluruh negara, terutama di negara-negara yang berada dalam situasi konflik maupun perang.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen DPR RI untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan global melalui berbagai forum multilateral. “Terlepas adanya kesulitan, kami tetap berupaya memastikan pencapaian SDGs. Kami pun berharap dukungan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga nantinya tidak ada satu masyarakat pun yang tertinggal dalam upaya pemulihan berkelanjutan. *No one left behind.*” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, Sidang IPU *Parliamentary Hearing* di PBB merupakan forum bagi parlemen seluruh dunia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif masing-masing negara terkait menghadapi tantangan global, serta menggali upaya bersama yang dapat didorong untuk mewujudkan pemulihan berkelanjutan. Setiap pandangan yang disampaikan, nantinya, akan menjadi rekomendasi pemerintah dunia yang tergabung dalam organisasi PBB, khususnya pada pembahasan Sidang Umum PBB pada September 2022 ini.

Dalam forum yang mengusung tema “Building Political Support and Inclusive Responses to Sustainable Recovery”, delegasi Parlemen Indonesia dalam forum tersebut dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) bersama para Pimpinan BKSAP DPR RI, mulai dari Sihar Sitorus (F-PDIP), Mardani Ali Sera (F- PKS), Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN). ■ ts/sf

Setjen DPR Gelar Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023



Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat membuka Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Foto: Bianca/nvl

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar rapat kerja untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Kesetjenan DPR RI tahun 2023.

Kegiatan itu merupakan langkah dalam mewujudkan komitmen bersama menuju Setjen DPR RI yang profesional. Pada rapat tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebutkan rencana kerja organisasi untuk tahun depan.

“Rencana kerja yang disusun merupakan penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang terukur,” kata Indra dalam sambutan pembuka rapat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/2).

Lebih lanjut Indra mengatakan, kegiatan tersebut mencerminkan

aktivitas yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Setjen Jenderal DPR RI untuk menunjang rencana kerja yang telah ditetapkan. “Selanjutnya ditetapkan beberapa kegiatan prioritas, merupakan kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” katanya.

Dalam menyusun rencana kerja itu, Sekjen menekankan pentingnya komitmen bersama guna menghasilkan rencana kerja dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. “Selain itu, satu tujuan rapat kerja hari ini adalah rencana kerja yang telah disusun akan mendukung tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tercantum di dalam Renstra (Rencana Strategis) Setjen DPR RI,” terang Indra.

Hal itu sangatlah penting untuk memastikan arah tujuan dari seluruh unit kerja agar beranjak ke arah yang sama. Dalam kesempatan yang

sama Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan Setjen DPR RI Aulia Sofyan menyatakan harapannya agar hasil rapat kerja ini memberikan manfaat, saran dan masukan konstruktif terhadap penyusunan RKA DPR RI tahun 2023.

“Serta menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang tidak ringan dalam rangka mewujudkan hasil keluaran (output) yang berkualitas dan bermanfaat serta memberikan dampak bagi peningkatan kualitas kinerja Setjen DPR RI,” kata Aulia.

Aulia menegaskan, Biro Organisasi dan Perencanaan Setjen DPR RI beserta jajaran siap membantu dan mendampingi seluruh unit kerja untuk menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI yang berkualitas dan mencerminkan sasaran kinerja yang akan dicapai. ■ ah,bia/sf

BKD Teken MoU dengan FEB UGM

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Didi Achjari melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya. Adanya kerja sama ini diharapkan memperkuat pelaksanaan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan yang meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

“Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) ini merupakan salah satu bentuk Kerjasama dalam meningkatkan kinerja Badan Keahlian DPR RI. Diharapkan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) ini Badan Keahlian DPR RI bersama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dapat meningkatkan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, saat penandatanganan MoU secara virtual, Jumat (20/2).

Adapun bahwa ruang lingkup dari Nota Kesepahaman yang dilakukan antara Badan Keahlian DPR dengan UMM mencakup beberapa hal, di antaranya yakni mengenai pelaksanaan penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik, berkenaan dengan pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pengawasan DPR RI. Sensi menuturkan, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi merupakan suatu kebutuhan dalam

rangka memperkuat dukungan teknis keahlian DPR RI.

Menurutnya, DPR RI harus menjadi lembaga yang kuat guna menjamin kebijakan publik yang diambil sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Kami memandang bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan APBN, dan pengawasan DPR RI,” ucap Sensi.

Di sisi lain, penandatanganan MoU ini akan membuka ruang kepada akademisi di lingkungan UGM dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagai bagian dari partisipasi publik. Hal ini juga sejalan dengan apa yang motto Badan Keahlian Dewan yaitu *Evidence-based on Legislative Policy Making*.

Sensi berharap, ke depan, dengan adanya kerja sama ini akan semakin

intensif, produktif, transparan, dan akuntabel dengan adanya upaya membangun sistem pengelolaan masukan masyarakat secara *online*. “Mudah-mudahan kerja sama ini ke depan bisa lebih intensif baik dalam riset dan diskusi karena banyak sekali yang harus kita pikirkan untuk negeri ini melalui DPR. UGM juga merupakan kampus yang berpengalaman di Indonesia dan saya harap penetrasi dan hubungan ke depan bisa lebih baik sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa dan negara kita,” tutupnya. ■ ann/sf

”

KAMI MEMANDANG BAHWA PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN MITRA STRATEGIS DALAM RANGKA OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN DUKUNGAN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI, PENETAPAN APBN, DAN PENGAWASAN DPR RI



Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Arief/nvl

Ketua BURT: Biro Pemberitaan Diharapkan Menjadi Satu-Satunya Sumber Berita Parlemen

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mendorong Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk terus berbenah diri dalam mendukung visi dan misi DPR RI yang menjadi lembaga perwakilan yang modern, terbuka, aspiratif dan berintegritas sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan tujuan bernegara.

“Kita diharapkan menjadi satu-satunya sumber berita parlemen, ini pun juga sudah pernah kita bicarakan di dalam rapat-rapat BURT bahwa seperti di beberapa negara itu kalau media-media swasta maupun pemerintah negara itu ingin mendapatkan berita mengenai parlemen harus mengambil dari TV Parlemen di sana, sehingga dengan demikian itu bisa memberikan *tone* yang baik,” kata Agung saat memberikan arahan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (22/2).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, bahwa di dalam DPR ini ada 9 fraksi (perwakilan partai politik) dengan

9 suara yang berbeda. Hal ini tentu menjadi suatu kesulitan bagi Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI untuk menyampaikan suara dari masing-masing fraksi karena harus dapat mengakomodir seluruhnya, bahkan dari masing-masing Anggota DPR RI yang memiliki cara pandang yang berbeda.

“Ini yang menjadi unik di lembaga DPR, namun hal ini yang juga menjadi

kesulitan bagi jajaran TV Parlemen dan Medtaksos (Media Cetak dan Media Sosial) untuk memberikan respon secara cepat karena tidak memiliki kewenangan. Kendala lainnya juga karena Pemberitaan Parlemen belum memiliki bentuk yang jelas. Tentunya dengan program *News Room* ini kita ingin ada satu metode baru lagi bisa lebih efektif,” pungkas Agung.

Dalam acara ini hadir Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah dan sejumlah pejabat Setjen DPR RI, di antaranya Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputi Bidang Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Indra Pahlevi, serta sejumlah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber di bidang komunikasi dan media. ■ a/s/sf



Ketua BURT DPR RI
Agung Budi Santoso.
Foto: Runi/nvl



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti melakukan kunjungan lapangan ke beberapa sekolah di Kota Manado, antara lain SD Negeri Kolongan, SMP Advent Unklab Airmadidi, SMA Unklab Airmadidi, SMAN 1 Guru Lombok Kalawat, guna melihat pelaksanaan sistem Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta menyerap berbagai masukan, keluhan dan kendala yang dihadapi sekolah di Sulawesi Utara, khususnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Saat menyambangi kompleks SMP Advent Unklab Airmadidi dan SMA Unklab Airmadidi, Agustina merasa terpujau akan kondisi dan suasana yang ada di sekolah swasta tersebut. Menurutnya, SMP Advent dan SMA Unklab adalah tipe sekolah yang sangat diharapkan dan menjadi dambaan banyak orang.

“Pertama kali saya melihat suasana sekolah ini seperti bermimpi. Sekolah yang kita harapkan dan kita dambakan adalah seperti ini. Rapi, bersih, tertata, bahkan pohon-pohonnya tumbuh dengan sehat. Lantainya juga bersih dan semuanya serba *perfect*. Dengan demikian kita bisa membayangkan jika anak-anak masuk sekolah, tentu suasana bathinnya sangat terdukung dengan situasi pengelolaan yang seperti ini,” puji Agustina di Kota Manado, Sulut, Selasa (22/2).

”

SEKOLAH YANG KITA HARAPKAN DAN KITA DAMBAKAN ADALAH SEPERTI INI. RAPI, BERSIH, TERTATA, BAHKAN POHON-POHONNYA TUMBUH DENGAN SEHAT

Komisi X Puji Kondisi dan Suasana Belajar SMP-SMA Unklab Manado



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI mengunjungi SMP Advent Unklab Airmadidi. Foto: Dep/nvl

Politisi PDI-Perjuangan itu juga melihat proses para guru dalam melakukan pengajaran kepada siswanya yakni dengan menularkan semangat energi belajar, dimana ketika memulainya dengan cara memberikan *clue*, sehingga seluruh siswa bersemangat dan merasa dirinya bisa.

“Ini adalah suasana belajar yang sangat luar biasa. Saya yakin dengan melihat berbagai piala penghargaan yang terpampang di sekolah ini pasti sekolah ini, baik SD, SMP, dan SMA nya sering mengantarkan siswanya

menjadi juara. Para guru dan suasana sekolahnya semuanya menebarkan energi positif,” tuturnya.

Agustina berharap pandemi Covid bisa segera berlalu dan bisa mendengar kembali riuh renyah suara anak didik disekitar selasar sekolah serta mereka bisa bercengkerama dengan para gurunya. “Kalau belajar *online* itu walaupun materinya selesai, tetapi secara psikologi anak-anak tetap membutuhkan sentuhan, sapaan, dan tatapan mata dari para gurunya,” ucap Agustina. ■ dep/sf

SAVE THE DATE!



The 144 IPU

(Inter-Parliamentary Union) Assembly & Related Meetings

**Nusa Dua, Indonesia
20 - 24 Maret 2022**



“Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change”